



## Komisi D DPRD Sidoarjo Tampung Usulan Kenaikan UMK

Sidoarjo – HARIAN BANGSA

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sidoarjo menampung usulan yang disampaikan oleh ratusan massa yang tergabung dalam Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Sidoarjo terkait kenaikan Upah Minimum Kabupaten (UMK) sebesar 10 persen.

Ketua Komisi D DPRD Sidoarjo, Dhamroni Chudlori di Sidoarjo, Rabu, menyatakan apresiasi terhadap aspirasi setiap elemen masyarakat termasuk para buruh yang menggelar aksi unjuk rasa tersebut. "Kami apresiasi hal tersebut yang mana merupakan hak setiap elemen warga masyarakat," ucap Dhamroni.

Dhamroni menyampaikan ada regulasi yang menjadi dasar penetapan upah minimum di suatu daerah yang mencakup banyak pemangku kepentingan, terutama dari pihak buruh dan perusahaan yang terlibat.

Maka dari itu pihaknya menjelaskan bahwa DPRD Sidoarjo akan mengusulkan kepada pemerintah terkait aspirasi kaum buruh tersebut sebagai bentuk perwakilan masyarakat daerah Sidoarjo khususnya kaum buruh. "Keputusan akhir tetap ada di tangan Gubernur, kami hanya bisa membantu dengan menyampaikan usulan kepada pemerintah," jelas Dhamroni.

Sementara itu massa yang



Massa yang tergabung dalam Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Sidoarjo bergerak menuju Pendopo Kabupaten Sidoarjo, Rabu (13/11/2024).

turun ke jalan meminta Pemerintah Kabupaten Sidoarjo untuk memperhatikan kesejahteraan buruh yang menjadi tulang-pung-

gung perekonomian Sidoarjo.

"Kami sudah meminta Disnaker Sidoarjo untuk memerintahkan Dewan Pengupahan un-

tuk segera membahas kenaikan upah pekerja Sidoarjo," ujar koordinator aksi Suyatno.

Suyatno menerangkan bahwa tuntutan kenaikan upah buruh sebesar 10 persen merupakan hal yang wajar menilai pertumbuhan ekonomi Sidoarjo sebesar 6,6 persen banyak disokong oleh industri yang mempekerjakan kaum buruh.

Pihaknya menjelaskan selama empat tahun terakhir kenaikan UMK di Sidoarjo hanya naik 3 persen atau sebesar Rp 40.000 yang dinilai tidak paralel dengan kenaikan Upah Minimum Provinsi yang menyentuh angka 6,13 persen dari tahun 2023 lalu. (ant/rus)

HARIAN  
BANGSA

Koran Minggu, Jember

## KPPBC TMP B Sidoarjo Musnahkan Rokok Ilegal

Sidoarjo – HARIAN BANGSA

Upaya memberantas peredaran rokok ilegal, Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Sidoarjo (KPPBC TMP B Sidoarjo) memusnahkan barang kena cukai ilegal, hasil penindakan periode Juni hingga September 2024. Kegiatan ini berlangsung di PT Hijau Alam Nusantara (HAN), Mojokerto, Selasa (12/11/2024).

Sebanyak 5.973.164 batang rokok ilegal dengan total Rp8,255.236.920 dimusnahkan melalui proses pembakaran. Aksi tegas ini dilakukan untuk memastikan barang-barang tersebut tidak kembali beredar di pasaran dan merugikan negara.

Selama periode tersebut, Bea Cukai Sidoarjo telah melakukan penindakan di berbagai wilayah, termasuk Sidoarjo, Surabaya, dan Mojokerto. Modus pelanggaran

yang ditemukan pun beragam. Mulai dari penggunaan pita cukai bekas, palsu, hingga penyalahgunaan pita cukai untuk jenis rokok yang berbeda.

Kepala Kantor Bea Cukai setempat, Rudy Hery Kurniawan mengatakan peredaran rokok ilegal tidak hanya merugikan negara dari sisi penerimaan cukai, tetapi juga menciptakan persaingan yang tidak sehat bagi industri rokok resmi.

"Diperkirakan, negara mengalami kerugian mencapai Rp4,439.037.624 akibat peredaran rokok ilegal ini," kata Rudy.

Rudy menegaskan, pemusnahan ini merupakan bukti komitmen pemerintah dalam memberantas peredaran rokok ilegal. Pihaknya akan terus meningkatkan pengawasan dan penindakan untuk melindungi masyarakat dari dampak buruk produk ilegal serta mengopti-



Pemusnahan rokok ilegal di PT Hijau Alam Nusantara, Mojokerto.

malkan penerimaan negara.

"Pemusnahan ini menjadi bukti keseriusan pemerintah dalam melindungi masyarakat dari dampak buruk barang kena cukai ilegal serta mengoptimalkan penerimaan negara di bidang cukai," tegas Rudy.

Rudy mengajak masyarakat untuk berperan aktif dalam memberantas peredaran rokok ilegal dengan melaporkan setiap informasi terkait. "Langkah ini diharapkan dapat menciptakan tata-tatanan perdagangan yang adil dan berkelanjutan," harapnya

Dalam proses pemusnahan sendiri, dilakukan dengan memperhatikan aspek lingkungan. Metode pembakaran yang diterapkan di PT Hijau Alam Nusantara dirancang untuk meminimalkan dampak negatif terhadap kualitas udara. (cat/rus)

HARIAN  
BANGSA

Koran Minggu, Jember

## U-Turn Jalan S. Parman Pakai Skema Buka Tutup

**SIDOARJO** – Setelah melalui tahap uji coba, Satlantas Polresta Sidoarjo memutuskan untuk tidak memermanenkan penutupan jalur putar balik (*U-turn*) di jalur utama Sidoarjo-Surabaya, tepatnya di Jalan Letjen S. Parman.

Sebagai gantinya, jalur putar balik itu diberlakukan sistem buka tutup, di mana penutupan *U-turn* dilakukan pada jam-jam tertentu untuk meminimalkan kemacetan di ruas jalan tersebut.

"Jadi, diterapkan sistem buka tutup untuk *U-turn* di Jalan Letjen S. Parman, ada jam-jamnya. Pada pagi dan sore hari," kata Kanit-



AHMAD REZA/JAWA POS

**SITUASIONAL:** Papan pembatas terpasang di U-turn Jalan Letjen S. Parman. Penutupan itu diputuskan tidak permanen.

turjawali Satlantas Polresta Sidoarjo AKP Jauhar.

Pada pagi hari, penutupan putar balik itu akan dilakukan pada pukul 06.00 hingga 08.00. Sedangkan pada sore hari, penutupan dilakukan pukul 16.00 hingga 18.00.

"Sama-sama ditutup dua jam saja," katanya.

Meski begitu, Jauhar mengatakan bahwa jadwal penutupan tersebut tidak tetap. Petugas patroli bisa menutup *U-turn* sewaktu-waktu. (eza/ris)



FIRMA ZUHDI/JAWA POS

**MASIH PROSES:** Dua ornamen berdiri di area taman pasif di kawasan bundaran exit toll Sidoarjo.

## Udeng Pacul Gowang Hiasi Wajah Exit Toll

**SIDOARJO** - Wajah gerbang masuk wilayah Kota Sidoarjo tengah dipoles. Salah satunya di taman pasif di kawasan bundaran *exit toll* Sidoarjo. Selain ditata ulang, sejumlah ornamen baru juga dibangun.

Kepala Bidang Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Sidoarjo Hery Santoso mengatakan, penataan kali ini merupakan lanjutan dari program

sebelumnya. "Tahun lalu, taman pasif pulau jalan di Jalan Pahlawan *exit toll* sudah dibenahi," katanya.

Sedangkan untuk tahun ini, yang dibenahi DLHK adalah pulau jalan di sisi barat. Area tersebut diperbaiki karena menjadi salah satu pintu masuk Sidoarjo. "Seluruh orang yang masuk Sidoarjo dari *exit toll* bisa langsung melihat area taman pasif tersebut," kata Hery.

Selain menambah tanaman di area taman, DLHK membangun sejumlah ornamen. Di antaranya, udeng pacul gowang khas Sidoarjo yang terletak di dekat jalan raya.

Hery mengatakan, saat ini pelaksana proyek tengah menuntaskan pembangunan taman pasif tersebut. "Hasil akhirnya masih belum kelihatan. Akhir Desember nanti selesai dan baru bisa disaksikan," pungkasnya. **(uzi/ris)**

# Jawa Pos

## Belum Semua Pelaku Usaha Memahami Regulasi Perizinan

**SIDOARJO** - Sidoarjo menjadi salah satu kabupaten penyumbang investasi terbesar di Jawa Timur. Meski demikian, masih ada PR terkait kemudahan layanan perizinan bagi para pelaku usaha yang ingin berinvestasi di kabupaten ini.

Salah satu yang cukup krusial adalah masalah sosialisasi program kepada para pengusaha. Selain itu, yang juga diperlukan adalah keberadaan petugas khusus yang bisa menjadi pemandu proses perizinan.

Hal itu berdasarkan hasil forum konsultasi publik bagi pelaku usaha yang digelar Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Sidoarjo bersama *stakeholder*.

Forum itu jadi ajang pemetaan terkait kendala pelaku usaha terkait proses perizinan. "Perlu lebih banyak sosialisasi, terutama terkait tata cara pembuatan izin secara *online*," kata Wakil Ketua DPRD Sidoarjo Kayan.

Menurutnya, saat ini masih ada



keluhan terkait hal ini. Tak sedikit para pengusaha yang kesulitan. Sebab, regulasi perizinan memang kompleks. "Selain itu, perlu *contact person* sendiri agar pemohon izin tidak bingung," katanya.

Sebagai solusi, Pemkab perlu menambah akses informasi terkait tata cara pengurusan izin. "Sehingga semakin meminimalkan kurangnya

pemahaman dan informasi tentang perizinan," katanya.

Sementara itu, Kepala DPMPTSP Sidoarjo Rudi Setiawan mengatakan pihaknya terus memberikan layanan yang memudahkan. Di antaranya melalui *class meeting* atau grup khusus lewat aplikasi percakapan bersama pelaku usaha. "Secara *offline*, kami juga menyiapkan pelayanan kemudahan berusaha yang berisi 10 perangkat daerah teknis," katanya.

Rudi optimistis layanan-layanan ini bakal makin memudahkan para pengusaha. Karena itu pula, DPMPTSP optimistis untuk tahun ini target realisasi investasi Rp 12 triliun bisa tercapai.

"Yang kita lakukan, secara *offline* kita menyiapkan SDM pelayanan kemudahan berusaha yang berisi 10 perangkat daerah teknis," katanya. Secara *online*, pihaknya menyiapkan sistemnya dengan mengintegrasikan di aplikasi Sistem Informasi Pelayanan Perizinan Terpadu (SIPPADU). (uzi/ris)

## Jawa Pos

# Pembahasan UMK, Pemkab Tunggu Regulasi Pusat

## Pekerja Usul Kenaikan 10 Persen, Pengusaha Berpatokan Aturan

**SIDOARJO** - Di saat sejumlah daerah sudah mulai membahas usulan upah minimum kabupaten/kota (UMK) 2025, tidak demikian dengan Sidoarjo. Hingga kini, pemkab masih belum berani memulai proses tersebut.

Penyebabnya, pemkab bersama unsur-unsur dewan pengupahan (DP) masih menunggu peraturan dan petunjuk teknis penyusunan UMK tahun depan dari pemerintah pusat.

"Peraturan pemerintah (PP) terkait formula penyusunan UMK yang baru belum ada. Di sisi lain, PP itu yang akan jadi cantolan penyusunan. Karena itu, pembahasan (usulan UMK) masih menunggu PP yang baru," kata Kepala Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Sidoarjo Ainun Amalia kemarin.

Hal yang sama disampaikan Ketua Asosiasi Pe-



Peraturan Pemerintah terkait formula penyusunan UMK yang baru belum ada. Di sisi lain, PP itu yang akan jadi cantolan penyusunan. Karena itu, pembahasan (usulan UMK) masih menunggu PP yang baru."

### **AINUN AMALIA**

*Kepala Disnaker Sidoarjo*  
ngusaha Indonesia (Apindo) Sidoarjo Sukiyanto. Dia menyebutkan, cantolan hukum untuk pembahasan UMK harus jelas. "Kalau tahun lalu *kan* pakai PP 51 Tahun 2023, untuk pembahasan UMK tahun depan cantolannya harus jelas dulu, setelah itu baru kita bahas," katanya.

Dia menambahkan, terkait besaran kenaikan UMK, para pengusaha di Sidoarjo tidak memiliki keinginan khusus. "Pengusaha tidak kepingin nominal ini dan itu. Semua

dikembalikan ke aturan. Berapa pun nominalnya asal sesuai peraturan dan ketentuan," jelasnya.

Lantas, bagaimana dengan sikap para pekerja? Ketua Sarikat Buruh Muslimin Indonesia (Sarbumusi) Sidoarjo Ahmad Yani mengatakan bahwa saat ini pihaknya masih melakukan rapat koordinasi. "Setelah ini, kami segera menyusun rekomendasi usulan yang akan disampaikan terkait UMK 2025," katanya.

Meski belum final, Yani menyebutkan bahwa dasar perhitungan kenaikan UMK oleh kalangan pekerja mengacu pada angka kebutuhan hidup layak (KHL). "Proyeksinya ingin naik sekitar 10 persen," kata Yani.

Tahun ini, besaran UMK di Sidoarjo ditetapkan sebesar Rp 4,638 juta. Atau naik sekitar Rp 120 ribu dibandingkan tahun 2023 yang mencapai Rp 4,518 juta. Angka tersebut menjadikan UMK kabupaten ini menjadi tertinggi ketiga di Jawa Timur. (*uzi/ris*)



# INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN SIDOARJO



FASILITAS: Salah satu puskesmas yang ada di Kecamatan Sedati

## Tahun Depan, Dinkes Tak Tambah Jumlah Dokter Puskesmas

KOTA-Pemkab Sidoarjo masih belum berencana untuk menambah jumlah dokter di puskesmas. Namun, layanan kesehatan dipastikan tetap optimal seiring meski ada pertumbuhan jumlah peserta BPJS Kesehatan. Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan (Dinkes) Sidoarjo, Danang Abdul Ghani mengatakan, jumlah dokter di puskesmas memang perlu ditambahkan. Hal tersebut jika ada peningkatan jumlah kapitasi atau peserta BPJS di puskesmas. "Jika ada penambahan

kapitasi (di puskesmas, red) maka perlu penambahan jumlah dokter untuk memenuhi rasio kapitasinya." ucapnya kepada Radar Sidoarjo, Rabu (13/11). Pemenuhan rasio tersebut, demi menjaga kualitas pelayanan kesehatan di Puskesmas. "Menurut aturan yang ada, rasio ideal dokter di Puskesmas adalah satu dokter untuk setiap 5.000 peserta BPJS," jelasnya. Dengan rasio tersebut, tenaga medis di puskesmas dapat memenuhi kebutuhan masyarakat

● Ke Halaman 10



### KEMENDIKDASMEN

## Pemerintah Perlu Belanja Masalah



TUNGGU KAJIAN: Abdul Mu'ti

### Terkait Permintaan Organisasi Guru soal Zonasi

JAKARTA - Sejumlah organisasi guru sepakat PPDB jalur zonasi dilanjutkan. Namun, dengan beberapa catatan. Wakil Sekjen Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) Mansur memandang sistem zonasi sejatinya baik. Apalagi, ketika kembali pada aturan awal sesuai Permendikbud Nomor 1 Tahun 2021. Tapi sayangnya, dalam tujuh tahun

penerapannya, zonasi malah tidak dapat mencapai tujuan awalnya. Hal ini lantaran sistem zonasi tidak dilaksanakan dengan benar di tingkat paling bawah. Sebagai contoh, kuota zonasi untuk SD minimal 70 persen dari daya tampung. Lalu, SMP dan SMA minimal 50 persen dari daya tampung. Dengan ketentuan ini maka harusnya sekolah SD wajib menampung minimal 70 persen atau lebih atau sampai maksimal 100 persen dari jalur zonasi. "Yang artinya, apabila ada siswa

kuota barulah, sekolah dapat menerima jalur prestasi maupun perpindahan orang tua," jelasnya saat dihubungi Jawa Pos, kemarin (13/11). Tapi, yang terjadi justru sebaliknya. Sekolah yang notabene dipengaruhi oleh oknum tertentu justru lebih mengutamakan atau mendahulukan jalur prestasi dan perpindahan orang tua. Hal ini tentu saja mengurangi kuota zonasi. Sehingga kerap muncul kasus dimana siswa yang berada lebih dekat dari sekolah

malah tidak mendapatkan kuota lagi. "Jika demikian, alih-alih untuk meningkatkan kualitas pendidikan, pemerataan akses pun tidak akan tercapai," keluhnya. Koordinator Nasional Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G) Satriwan Salim memiliki pandangan yang sama. Sebaran sekolah dan tidak meratanya keberadaan guru di sekolah juga tidak mendukung program zonasi. Kondisi ini yang kemudian memaksa orang tua mengambil jalan pintas dengan

memanipulasi kartu keluarga karena pindah domisili. Terkait hal ini, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu'ti mengatakan, bahwa pihaknya masih belum memutuskan. Kemendikdasmen masih akan belanja masalah dan meminta pertimbangan dari sejumlah pakar terkait hal ini. Kendati begitu, dia menargetkan format regulasi baru sistem zonasi PPDB diusahakan rampung pada Februari mendatang. (mia/bas)

# Jawa Pos



# INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN SIDOARJO

Tingkatkan Efektivitas dan Capaian

## Pemkab Evaluasi Smart City, Sekda Minta Kolaborasi Hexahelix

**SIDOARJO** - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sidoarjo melalui Dinas Komunikasi dan Informatika menggelar evaluasi implementasi program kota cerdas (Smart City) Tahap 2 Tahun 2024. Penilaian kedua ini terkait pengembangan program Smart City sebagai upaya untuk meningkatkan efektivitas dan capaian di Kabupaten Sidoarjo. Acara tersebut dihadiri oleh sejumlah Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Kabupaten Sidoarjo.

Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Sidoarjo, Fenny Abridawati mengatakan bahwa dalam pengembangan Smart City dari tahun ke tahun dibutuhkan kolaborasi Hexahelix yang melibatkan enam unsur diantaranya pemerintah, industri, perguruan tinggi, masyarakat, swasta, hingga media massa untuk mendukung pencapaian tujuan Smart City.

"Sinergi yang solid akan mempercepat implementasi layanan publik yang lebih efektif, transparan, dan inovatif," katanya saat mem-



Evaluasi implementasi program kota cerdas (Smart City) Tahap 2 Tahun 2024

buka acara Evaluasi Implementasi Program Kota Cerdas (Smart City) Tahap 2 Tahun 2024 di Opsroom Setda Kabupaten Sidoarjo, Selasa sore, (12/11/24).

Fenny juga mengingatkan pentingnya pemanfaatan teknologi

yang canggih dan terintegrasi guna memenuhi kebutuhan masyarakat serta mengantisipasi tantangan perkembangan digital di masa depan.

"Ada sebanyak 75 persen program smart city yang sudah ber-

jalan, yaitu 17 program prioritas Bupati yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021-2026," jelasnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sidoarjo, Noer Rochmawati

berharap evaluasi yang dilakukan dapat menjadi panduan bagi OPD dalam menyesuaikan strategi dan program kerja terkait Smart City.

"Evaluasi ini menjadi bagian penting dalam memastikan semua sektor bekerja sesuai dengan visi dan misi Smart City, yaitu menciptakan Sidoarjo sebagai kota cerdas yang inovatif, inklusif, dan berkelanjutan," tuturnya Rabu (13/11/24)

"Kami juga berharap dapat mengidentifikasi aspek-aspek yang memerlukan peningkatan, sehingga setiap OPD dapat terus meningkatkan kinerja pelayanan publik berbasis digital yang menjawab kebutuhan masyarakat," tambahnya.

Dalam penilaian tersebut, menghadirkan asesor dari berbagai akademisi dan pemerintah pusat diantaranya,

1. Hafni Septiana : Praktisi IKTI
2. Aman Kurniawan : Kemenpan RB
3. Agus Tri Cahyono : Praktisi LAP
4. Dyah Mutiarin : Akademisi UMY
5. Wikan Danar Sunindyo : Akademisi ITB. ● **Loe**

# Jawa Pos

### Sidoarjo, Memorandum

Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) menggelar evaluasi implementasi program kota cerdas (Smart City) Tahap II. Penilaian kedua ini terkait pengembangan program itu sebagai upaya untuk meningkatkan efektivitas dan capaian di Kabupaten Sidoarjo. Acara tersebut dihadiri oleh sejumlah kepala organisasi perangkat daerah (OPD).

Sekdakab Sidoarjo Fenny Abridawati mengatakan, dalam pengembangan smart city dari tahun ke tahun dibutuhkan kolaborasi hexahelix yang melibatkan enam unsur. Di antaranya pemerintah, industri, perguruan tinggi, masyarakat, swasta, hingga media massa untuk

mendukung pencapaian tujuan.

"Sinergi yang solid akan mempercepat implementasi layanan publik yang lebih efektif, transparan, dan inovatif," katanya saat membuka acara yang digelar di Opsroom Setdakabupaten Sidoarjo, Selasa (12/11).

Fenny juga mengingatkan pentingnya pemanfaatan teknologi yang canggih dan terintegrasi guna memenuhi kebutuhan masyarakat serta mengantisipasi tantangan perkembangan digital di masa depan. "Ada sebanyak 75 persen program smart city yang sudah berjalan, yaitu 17 program prioritas bupati yang tertuang dalam RPJMD 2021-2026," jelasnya.

Kepala Dinas Kominfo Noer Rochmawati berharap, evaluasi yang dilakukan dapat menjadi panduan bagi OPD dalam menyesuaikan strategi

dan program kerja terkait smart city.

"Evaluasi ini menjadi bagian penting dalam memastikan semua sektor bekerja sesuai dengan visi dan misi smart city, yaitu menciptakan Sidoarjo sebagai kota cerdas yang inovatif, inklusif, dan berkelanjutan," tuturnya. "Kami juga berharap dapat mengidentifikasi aspek-aspek yang memerlukan peningkatan, sehingga setiap OPD dapat terus meningkatkan kinerja pelayanan publik berbasis digital yang menjawab kebutuhan masyarakat," tambahnya. (lud/jok/epe)



Rapat evaluasi implementasi program smart city kedua di Opsroom Setda Kabupaten Sidoarjo.

**MEMORANDUM**  
BEKERJA DAN MEMBELA TANAH AIR



# INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN SIDOARJO

## KILAS BIROKRASI

### Bappenas Catat Angka Kemiskinan di Sidoarjo 4.53 Persen

#### Sidoarjo, Bhirawa

Angka kemiskinan di Kabupaten Sidoarjo menurun dari tahun sebelumnya. Pada tahun 2024 ini sebesar 4.53%. Pihak Bappenas RI menyarankan supaya perangkat daerah di Kabupaten Sidoarjo terus bergerak bersama sama dalam menurunkan jumlah kemiskinan.

Fungsional Perencanaan Madya Bappenas RI, Widaryatno, mengatakan di Kabupaten Sidoarjo jangan sampai ada anak yang tidak sekolah. Kemudian, jangan sampai ada warga yang tidak mempunyai penghasilan.

Dalam acara Rakor penanggulangan Kemiskinan tahun 2024, yang digelar oleh Bappeda Sidoarjo, Rabu (13/11) kemarin itu, Sub Koordinator Kesejahteraan Rakyat Bappeda Provinsi Jatim, Didin Wahidin, mengharapkan tren penurunan kemiskinan di Kabupaten Sidoarjo tiap tahun supaya terus dipertahankan.

“Penurunan kemiskinan, supaya terus dilakukan sampai dengan tahun 2045, pada waktu era Indonesia emas,” kata Didin, yang menjadi salah satu Narasumber yang dihadirkan oleh Bappeda Sidoarjo.

Didin mengatakan angka kemiskinan di Provinsi Jawa Timur pada tahun 2023 sebesar 9.79%. Pada tahun Indonesia emas di tahun 2045 nanti, tiap tahun ditargetkan harus bisa menurun sebesar 0.25%.

Tentang kemiskinan di Kabupaten Sidoarjo, di daerah padat penduduk juga masih ditemui warga miskin dan menjadi pengangguran. Seperti di Kecamatan Waru, Taman dan Sidoarjo. “ini harus menjadi analisa,” katanya, dalam acara yang digelar di ruang rapat delta graha Setda Sidoarjo itu.

Kemudian, dirinya menyampaikan analisa, di wilayah padat penduduk di Kabupaten Sidoarjo, seperti Kecamatan Taman, Waru dan Sidoarjo, masih banyak ditemukan rumah yang tidak

layak huni. kus.wwn